

Polisi, Jaksa, dan KPK

Oleh Edi Setiadi

Lengkap sudah pejabat pimpinan lembaga penegakan hukum di negeri ini. Walaupun jalan menuju ke sana ada yang mulus (penentuan Jaksa Agung) serta ada yang berliku (penentuan Kapolri dan ketua KPK), pro-kontra juga menyertai perjalanan penentuan ketiga pimpinan penegak hukum ini.

Penetapan dan penentuan ketiga pimpinan lembaga penegakan hukum ini sangat penting. Pertama, kita mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum tentu tidak elok apabila perangkat negara yang menunjang terwujudnya penegakan hukum dan supremasi hukum mengalami kekosongan.

Kedua, problem utama dan krusial di Indonesia diyakini orang terletak pada proses penegakan hukum yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip dalam proses penegakan hukum. Masyarakat masih menganggap proses penegakan hukum di Indonesia mengalami kemunduran yang luar biasa.

Ketiga, pengangkatan pimpinan ketiga lembaga penegakan hukum ini diharapkan membawa perubahan bagi jalannya penegakan hukum atau paling tidak dapat membenahi kebobrokan dalam lembaganya masing-masing. Diharapkan, kepolisian, kejaksaan, dan KPK dapat menjaga dan membenahi kehormatan masing-masing sehingga masyarakat akan percaya bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan ketiga lembaga ini bukan sekadar umbar janji atau tebar pesona, melainkan dalam kerangka tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk menjamin tertib hukum dan tertib sosial.

Pembenahan intern di lembaga masing-masing akan menempatkan ketiga lembaga ini sebagai pionir atau pelopor dalam pemberantasan mafia hukum dan korupsi yang akhirnya akan membawa kepercayaan dari masyarakat. Ketiga lembaga penegakan hukum ini harus dapat membuktikan, sebagai alat penegak hukum mereka terdiri atas orang-orang bersih yang dapat menyapu kotoran dalam masyarakat (pelanggar hukum). Pembersihan pelanggar hukum dilakukan oleh sapu-sapu yang memang bersih. Tantangan lainnya adalah membenahan manajemen baik manajemen perkara maupun manajemen personel dan organisasi.

Perlu diingat, tugas ketiga lembaga penegakan hukum ini adalah menegakkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Masyarakat hanya mengharapkan bahwa dalam proses penegakan hukum tidak terjadi praktik-praktik yang menghina akal sehat dan logika hukum. Proses penegakan hukum harus benar-benar berada pada jalur yang sudah benar, yaitu hanya dalam kerangka mencari kebenaran materiil dan keadilan bagi semua orang.

Tantangan terdepan yang dihadapi kepolisian adalah tren kejahatan yang semakin kompleks di samping gangguan keamanan yang makin masif. Perkembangan kejahatan seperti ini tentu saja diperlukan aparat yang menguasai teknologi dan lebih profesional. Tantangan lainnya adalah memulihkan citra lembaga bahwa kepolisian adalah lembaga yang kredibel dan dapat dipercaya. Kasus rekayasa kasus pimpinan KPK, rekayasa mafia hukum pajak, dan rekening gendut perwira polisi yang dianggap tidak wajar adalah perkara-perkara yang harus dapat diselesaikan secara elegan oleh Kapolri.

Tantangan terhadap kejaksaan pun idem dito. Ketertutupan mereka terhadap kritik dan koreksi dari masyarakat, di samping juga tergoda dengan bermain politik praktis ketika mengusulkan Jaksa Agung harus dari internal kejaksaan. Yang terpenting, bagaimana Jaksa Agung dan jajaran kejaksaannya dapat bekerja maksimal untuk menegakkan hukum. Jaminan Jaksa Agung darimana pun asalnya dapat terwujud, apabila kejaksaan berani melakukan autokritik atas perjalanan pengabdianya kepada masyarakat dan negara.

Sementara itu, KPK yang merupakan lembaga independen dan dianggap kredibel seharusnya menampakkan wajah bersih dari terinfeksi penyakit yang mengarah kepada kolusi, korupsi, dan nepotisme. KPK harus berprinsip fiat justitia roeat coulum (tegakan keadilan walaupun langit akan runtuh).

Sinergitas ketiga lembaga penegakan hukum ini harus segera dibenahi dan diperkuat. Sikap saling curiga, niat saling menjatuhkan dan ego sektoral harus dibuang jauh-jauh sebab tujuan penegakan hukum yang dilaksanakan melalui ketiga lembaga penegakan ini adalah sama, yaitu keadilan bagi semua pihak. Harapan rakyat terhadap ketiga lembaga penegakan hukum ini harus terus dipupuk, sebab apabila tidak, jangan salahkan rakyat apabila ketiga lembaga penegakan hukum ini direformasi oleh rakyat melalui kekuatannya.

Membaiknya performa dan kinerja dari ketiga lembaga penegakan hukum ini, di samping akan meneguhkan kembali Indonesia adalah negara hukum, juga akan menumbuhkan kepercayaan asing terhadap pemerintah. Diharapkan investasi akan datang dengan deras manakala praktik korupsi menjadi tereleminasi akibat tegasnya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah serta independennya lembaga penegakan hukum tadi.

Sebagai lembaga penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK tidak boleh lepas dari pengawasan, baik yang dilakukan oleh parlemen maupun oleh komisi-komisi yang dibentuk, atau oleh masyarakat. Kinerja mereka tetap harus diawasi supaya mereka terhindar dari praktik pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penguatan komisi kepolisian, komisi kejaksaan harus segera dilakukan sebagaimana pembentukan komisi yudisial untuk mengawasi perilaku para hakim. Selamat bekerja trisula penegak hukum. ***

Penulis, Guru Besar Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Kopertis Wilayah IV Jabar dpk pada FH Unisba, Wakil Rektor I Unisba Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama.

Sumber:

Pikiran Rakyat, Rabu, 1 Desember 2010

<http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=166151>